

**Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau
Putaran Ke Dua Di Kota Pekanbaru Tahun 2013**

(Studi Kasus di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki)

SAMSUL BAHRI

Dosen Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Phone/fax : +62(0)761, 63277

Website : <http://fisip.unri.ac.id>

Syam_sp21@yahoo.com

ABSTRACT

Political participation of the community in direct local elections is an important institution in any democratic country like Indonesia . Local elections is also a means of political education for the people who are directly and openly . That is expected to increase public awareness about democracy . Local elections emphasize democratization process better and deeper . Local elections laden with political competition among the participants .

Researchers study detailing the problem as follows : How can public participation during the day (voting) , and whether the factors that cause a lot of abstentions or no vote on the election of the Governor and Deputy Governor of Riau second round of 2013 in the Village of Air Hitam District of Payung Sekaki, Pekanbaru .

This research was conducted with descriptive qualitative method with purposive sampling technique and key person in order to build knowledge representations based on a relatively deep and detailed . While the analysis of data using triangulation of data and data analysis with interactive models of data .

After doing research and data processing can be concluded that the public's understanding of the elections and the relatively low level of political participation , as well as the factors that determine cause many non-voters or did not vote on the election of the Governor and Deputy Governor of Riau second round of 2013 in the Village of Air Hitam District of Payung Sekaki Pekanbaru city largely because of socioeconomic factors , psychological factors and factors of rational choice and the apathy and indifference of the society towards the common election because of the crisis of public trust in the leader .

Keywords : Participation , politics , society .

A. Latar belakang Masalah

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, termasuk pemilihan pejabat politik pada tingkat lokal. Penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik dan berkala ditujukan untuk memilih seorang pejabat publik pada tingkat daerah maupun nasional. Pemilihan langsung telah mendekatkan antara kandidat dengan masyarakat.

Proses demokratisasi di Indonesia memasuki babak baru dengan lahirnya Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang mekanisme pergantian kepemimpinan daerah, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung (Pasal 24 Ayat 5). Hal ini merupakan lompatan besar dalam menjalankan demokratisasi di Indonesia. Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpinnya merupakan indikator dalam menjalankan proses demokratisasi. Hal ini baru dirasakan sejak berlakunya Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diberlakukannya Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui perwakilannya yang duduk dilembaga perwakilan/DPRD. Mekanisme seperti ini dirasakan kurang mewakili aspirasi rakyat. Salah satu penyebabnya adalah rakyat tidak mengetahui kualitas calon pemimpin dan melemahkan aspek akuntabilitas dan transparansi sebagai syarat terwujudnya Good Governance (prihatmoko, 2008:03). Pemilihan Gubernur di Provinsi Riau melalui 2 putaran. Putaran pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diikuti 5 pasang calon. Hasil pemilihan pertama tidak memperoleh suara mutlak, selanjutnyadipilih 2 pasangan calon yang memiliki jumlah suara terbanyak yakni pasangan nomor urut 1 dan 2. Pada putaran pertama partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga mengalami penurunan.

Masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi suatu masalah yang serius yang terjadi pada pemilukada Provinsi Riau putaran kedua tahun 2013. Untuk menjelaskan masalah partisipasi ini akan dipaparkan dengan data sebagai berikut,

Tabel I.1 Tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama di Kota Pekanbaru tahun 2013

No	Kecamatan	Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih	Masyrakat yang memilih (%)	Masyarakat yang tidak memilih (%)
1	SUKAJADI	16.760	18.263	47,85	52,15
2	PEKANBARU KOTA	8.890	11.420	43,77	56,23
3	SAIL	8.502	10.772	52,92	47,08
4	LIMA PULUH	15.868	14.671	52,95	48,05
5	SENAPELAN	14.983	11.229	57,16	42,84
6	RUMBAI	22.271	16.316	57,71	42,29
7	BUKIT RAYA	33.981	25.722	56,91	43,09
8	TAMPAN	49.452	43.237	53,35	46,65
9	MARPOYAN DAMAI	42.983	37.458	53,43	46,57
10	TENAYAN RAYA	44.992	38.190	54,08	45,92
11	PAYUNG SEKAKI	30.239	28.701	51,30	48,70
12	RUMBAI PESISIR	26.275	19.514	57,38	42,62
	JUMLAH	314.911	272.568	53,60	46,40

Sumber : KPU kota Pekanbaru 2013

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 272.568 orang atau 46,40% masyarakat yang ada di Pekanbaru tidak ikut memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama, Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki tingkat partisipasi paling rendah, yaitu sebesar 43,77% masyarakatnya tidak memilih. Kemudian Kecamatan Sukajadi dan Payung Sekaki yang memiliki persentase partisipasi masyarakat kota pekanbaru pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama rendah, dan mengalami penurunan pada pemilu putaran kedua. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel I. 2 Tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran kedua di Kota Pekanbaru tahun 2013

No	Kecamatan	Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih	Masyarakat yang memilih (%)	Masyarakat yang tidak memilih (%)
1	SUKAJADI	14.641	20.382	50,45	49,55
2	PEKANBARU KOTA	7.681	12.629	49,43	50,57
3	SAIL	7.245	8.819	45,10	54,90
4	LIMA PULUH	14.059	16.840	41,80	58,20
5	SENAPELAN	13.225	12.987	46,04	53,96
6	RUMBAI	19.103	19.484	45,39	54,61
7	BUKIT RAYA	29.514	30.189	45,13	54,87
8	TAMPAN	42.067	50.622	37,82	62,18
9	MARPOYAN DAMAI	36.653	43.788	51,52	48,48
10	TENAYAN RAYA	38.157	45.025	45,87	54,13
11	PAYUNG SEKAKI	26.597	32.343	45,57	54,43
12	RUMBAI PESISIR	23.952	22.197	49,51	50,49
	JUMLAH	272.534	314.945	46,39	53,61

Sumber : KPU Kota Pekanbaru 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru pada putaran kedua sangat rendah. Secara keseluruhan jumlah yang tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran kedua sebesar 314.945 orang atau 53,61%, sedangkan yang memilih sebesar 272.534 orang atau 46,39%.

Fenomena menurunnya tingkat partisipasi hampir terjadi seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi di sepuluh Kecamatan di Kota Pekanbaru sangat rendah. Dimana jumlah yang tidak menggunakan hak suaranya lebih banyak dibandingkan yang menggunakan hak suaranya. Ini terdapat di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail, Lima puluh, Rumbai, Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan raya, dan Payung Sekaki. Sedangkan masyarakat yang memilih lebih tinggi dari masyarakat yang tidak memilih hanya terdapat di kecamatan Senapelan dan Rumbai Pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru sangat rendah.

Berdasarkan data-data tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Pekanbaru pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua tahun 2013. Disini penulis akan melakukan penelitian disalah satu kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 3 Tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran Pertama di Kecamatan Payung Sekaki tahun 2013

No	Kelurahan	Jumlah DPT	Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih	Masyarakat yang memilih (%)	Masyarakat yang tidak memilih (%)
1	TAMPAN	15.843	8.227	7.616	51,92	48,08
2	LABUH BARU TIMUR	17.724	8.989	8.735	50,72	49,28
3	LABUH BARU BARAT	19.205	10.314	8.891	53,70	46,30
4	AIR HITAM	6.168	2.592	3.576	42,02	57,98
	JUMLAH	58.940	30.122	28.818	51,10	48,89

Sumber : KPU Kota Pekanbaru 2013

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 28.818 orang atau 48,89% masyarakat yang ada di Kecamatan Payung Sekaki tidak ikut memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama. Kelurahan Air Hitam memiliki tingkat partisipasi paling rendah, yaitu sebesar 57,98% masyarakatnya tidak memilih, dan mengalami penurunan pada pemilu putaran kedua. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel I. 4 Tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran kedua di Kecamatan Payung Sekaki tahun 2013

No	Kelurahan	Jumlah DPT	Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih	Masyarakat yang memilih (%)	Masyarakat yang tidak memilih (%)
1	TAMPAN	15.843	7.345	8.498	46,36	53,64
2	LABUH BARU TIMUR	17.724	8.442	9.282	47,63	52,37
3	LABUH BARU BARAT	19.205	9.040	10.165	47,07	52,93
4	AIR HITAM	6.168	2.135	4.033	34,61	65,39
	JUMLAH	58.940	26.962	31.978	45,74	54,26

Sumber : KPU Kota Pekanbaru 2013

Dari data diatas dapat dilihat bahwa fenomena rendahnya tingkat partisipasi di Kecamatan Payung Sekaki pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran Kedua tahun 2013 terjadi di seluruh kelurahan, bahkan ada satu kelurahan yakni Kelurahan Air Hitam partisipasi politiknya hanya 34,61%.

Dilihat dari tabel diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian disalah satu kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki. Disini penulis Memilih Kelurahan Air Hitam sebagai lokasi penelitian dengan argumentasi bahwa fenomena tingkat Partisipasi di kelurahan Air Hitam ini mengalami penurunan dari putaran pertama hingga putaran kedua.

B. Perumusan masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah: “ Mengapa tingkat partisipasi politik di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua tahun 2013 rendah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah : untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua tahun 2013.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan masukan bagi penyelenggara Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi.
3. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.

E. Kerangka teori

Untuk membantu penulis, maka pada bagian kerangka ini akan dikemukakan beberapa konsep penting diantaranya.

1. Teori perilaku memilih

Dalam kajian perilaku memilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (*votingbehavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku *non-voting* yaitu: *pertama*, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi memilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan *kedua*, menekankan pada harapan memilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih (dalam Hasanuddin M. Saleh;2007).

Secara sederhana pendekatan ini menyatakan bahwa jika biaya yang dikeluarkan untuk tidak memilih lebih kecil dari keuntungan yang akan diperoleh maka orang akan cenderung untuk tidak memilih. Pendekatan kedua ini dijelaskan lebih jauh karena kesulitan penggunaanya. Berikut akan diuraikan secara singkat karakter sosial dan psikolog memilih.

a. Karakteristik sosial ekonomi

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik memilih non-voting itu sendiri.

Indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga (**Sastroatmodjo,1995:15**). Lazimnya, variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan berhubung dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubung dengan ketidakhadiran memilih.

b. Faktor psikologis

Penjelasan non-voting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Penjelasan ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran dan tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal, yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan disekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang mampu memimpin teman teman sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi dimana mereka bekerja, dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh orientasi kepribadian memilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie dan alienasi. Secara teoritis perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik atau adanya perasaan bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

c. faktor pilihan rasional

secara teoritik Pilihan rasional bersandar pada hasil karya dua ilmuwan besar yang menjadi landasan teori pilihan rasional. Yakni, Antoni Downs yang menghasilkan karya *An Economic Theory of Democracy (1957)* dan Mancul Olson yang menghasilkan karya *The Logic Of Collective Action (1965)*. Keduanya menjadi pionir untuk studi-studi pilihan rasional. Teori pilihan rasional memandang bahwa individu pemilih bukan merupakan yang terdeterminasi dalam menentukan pilihannya karena faktor-faktor dari luar dirinya yang mempengaruhi arah pilihannya. Sebaliknya teori ini memandang individu pemilih sebagai seseorang yang secara sukarela atau bebas menentukan pilihannya berdasar pertimbangan yang menguntungkan dirinya, mereka hanya akan memilih jika memperoleh keuntungan dari pemilihan tersebut, sebaliknya apabila tidak memperoleh keuntungan maka pemilih cenderung tidak menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini, Evans menyatakan bahwa teori pilihan rasional memfokuskan pada pemilih individual dan berupaya menjelaskan proses pengambilan keputusan untuk kandidat yang akan dipilih (Evans, 2007:70)

d. Faktor Struktural

Faktor yang menjadi pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemiluakada diakibatkan persoalan teknis. Dalam hal ini, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga mengururkan hak mereka sebagai pemilih.

2. Partisipasi politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990:16-18) dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karna partisipasi politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, ilegal atau legal, efektif atau tidak efektif.

Ramlan Subakti (2007:118) menurutnya partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Miriam Budiarto (2009:01) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara. Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota salah satu partai atau kelompok kepentingan dan sebagainya.

Michael Rush (Kartini Kartono, 1983:23) memberikan pendapatnya mengenai partisipasi politik bahwa Orang-orang yang tidak ikut dalam politik mendapat julukan, seperti Apatisme, Sinisme, Alienasi, Anomie.

1. Apatisme (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala
2. Sinisme menurut **Agger** diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”. Dalam hal ini dia menilai bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apapun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
3. Alienasi merujuk pada perasaan tidak berguna. Menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
4. Anomie, yang oleh **Lane** diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

F. Konsep Operasional

1. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dengan secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah,
2. Masyarakat yang tidak memilih (*non-voting*) merupakan sejumlah kelompok manusia yang hidup dalam lingkungan yang sama dan memiliki cita-cita yang sama yang tidak ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan tidak memilih pemimpin negara dengan secara langsung maupun secara tidak langsung.
3. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memilih pemimpin di daerah sehingga rakyat dapat memilih kepala daerahnya secara langsung, bebas, rahasia dan tanpa intervensi sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005..

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena Kelurahan ini tingkat partisipasinya termasuk yang paling rendah dan dari segi komposisi penduduknya Kelurahan Air Hitam merupakan daerah yang mayoritas penduduknya adalah Buruh, Pegawai Swasta dan mahasiswa.

2. Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini key person/ key informan.

3. Teknik pengumpulan data

- a.** Wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui masalah ini.
- b.** Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait.

4. Teknik Analisa Data

Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder, selanjutnya penulis menggunakan teknik deskriptif yang mana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menurut teori yang digunakan dan disajikan dalam uraian-uraian.

H. Pembahasan

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran ke dua di kota Pekanbaru tahun 2013

Proses demokratisasi di Indonesia memasuki babak baru dengan lahirnya Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum peyelenggaraan Pemilukada, didalamnya mengatur tentang mekanisme pergantian kepemimpinan daerah, yaitu Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pasal 24 Ayat 5). Hal ini merupakan lompatan besar dalam menjalankan demokratisasi di Indonesia. Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpinnya merupakan indikator dalam menjalankan proses demokratisasi. Hal ini baru dirasakan sejak berlakunya Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diberlakukannya Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui perwakilannya yang duduk dilembaga perwakilan/DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang peyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Pemilukada pertama yang berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan parpol. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan atau independen yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi Yang membatalkan Pasal yang meyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004.

Salah satu pilar penting dari demokrasi adalah partisipasi. Jika demokrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, dan, untuk rakyat maka partisipasi merupakan sarana dimana rakyat dapat menentukan siapa yang memimpin melalui pemilihan kepala daerah langsung dan apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin (pemerintah) melalui keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik yang mengikat rakyat banyak. Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam menentukan pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga menentukan proses demokrasi itu sendiri. Dalam proses transisi Dan konsolidasi demokrasi misalnya, masyarakat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan percepatan proses transisi dan konsolidasi demokrasi melalui berbagai bentuk partisipasi dan gerakan sosial lainnya (**Hollifeild dan Jillson,2003:3-20**). Salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Riau merupakan satu wujud demokrasi dimana semua masyarakat Riau memiliki hak untuk memilih sendiri pemimpinnya secara langsung. Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Riau melalui 2 putaran. Putaran pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diikuti 5 pasang calon. Hasil pemilihan pertama tidak memperoleh suara mutlak, selanjutnya dipilih 2 pasangan calon yang memiliki jumlah suara terbanyak yakni pasangan nomor urut 1 dan 2. Pada putaran pertama partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Pekanbaru mengalami penurunan.

sebanyak 272.568 orang atau 46,40% masyarakat yang ada di Pekanbaru tidak ikut memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama, Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki tingkat partisipasi paling rendah, yaitu sebesar 43,77% masyarakatnya tidak memilih. Kemudian Kecamatan Sukajadi dan Payung Sekaki yang juga

memiliki persentase partisipasi rendah. Partisipasi Masyarakat kota pekanbaru pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran pertama rendah, dan mengalami penurunan pada pemilu putaran kedua.

tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru pada putaran kedua sangat rendah. Secara keseluruhan jumlah yang tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau putaran kedua sebesar 314.945 orang atau 53,61%, sedangkan yang memilih sebesar 272.534 orang atau 46,39%.

Fenomena menurunnya tingkat partisipasi hampir terjadi seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Tingkat partisipasi di sepuluh Kecamatan di Kota Pekanbaru sangat rendah. Dimana jumlah yang tidak menggunakan hak suaranya lebih banyak dibandingkan yang menggunakan hak suaranya. Ini terdapat di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail, Lima puluh, Rumbai, Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan raya, dan Payung Sekaki. Sedangkan masyarakat yang memilih lebih tinggi dari masyarakat yang tidak memilih hanya terdapat di kecamatan Senapelan dan Rumbai Pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru sangat rendah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa partisipasi politik masyarakat rendah dan lebih memilih untuk tidak ikut memilih atau terlibat dalam pemilihan umum kepala daerah seperti:

1.1 Faktor sosial Ekonomi

Menempatkan variabel status ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku *non-voting* selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku *non-voting* tersebut. Namun pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih *non-voting* itu sendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial ekonomi untuk menjelaskan perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran memilih.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih yaitu:

1.1.1 Pekerjaan

Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Seperti yang dijelaskan pada tabel II.3 penduduk Kelurahan Air Hitam memiliki pekerjaan yang beragam-ragam mulai dari PNS, TNI/POLRI, Pegawai Swasta, Buruh, Pedagang, Pengusaha dll. Di Kelurahan Air Hitam sesuai dengan data yang diperoleh jenis pekerjaan yang lebih mendominasi adalah buruh dan pegawai swasta. Untuk dapat mengetahui apakah pekerjaan mempengaruhi partisipasi masyarakat Kelurahan Air Hitam pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013, maka saya melakukan wawancara dengan seorang penduduk yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan seorang yang berprofesi sebagai Buruh.

Wawancara dengan “ Herman” Pegawai Negeri Sipil, yang diwawancarai pada tanggal 03 Januari 2014, mengatakan :

“ saya ikut memilih karena itu kewajiban saya sebagai warga negara yang baik, selain itu saya ini seorang PNS aparatur pemerintahan yang mana kebijakan kebijakan yang diambil gubernur terpilih akan berdampak kepada kami dan saya kira semua PNS juga berpikiran sama dengan saya.

Hal ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh “Sapta Agus” seorang buruh yang diwawancari pada tanggal 03 Januari 2014, mengatakan :

“ saya tidak ikut memilih karena menurut saya tidak ada pengaruhnya bagi saya, siapa pun yang terpilih tidak ada untungnya bagi saya dan lebih baik saya bekerja mencari nafkah.

Wawancara dengan “Aprizar” seorang Pedagang tanggal 03 Januari 2014 mengatakan:

“ saya tidak ikut memilih karna saya dan anak saya sibuk mengurus dagangan dan tidak ada waktu untuk pergi ke TPS, tidak ada pengaruhnya bagi saya dan keluarga saya jika salah satu dari pasangan calon menang.

1.1.2 Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dikatakan mempengaruhi pemilih masyarakat di Kelurahan Air Hitam. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sebab pendidikan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menganalisa teori serta mampu untuk menentukan keputusan dalam persoalan-persoalan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai faktor yang penting bagi masyarakat sebagai pelaku partisipasi aktif dalam pemilihan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ketajaman dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan-persoalan sosial yang diterima semakin meningkat dan menciptakan minat dan kemampuannya dalam berpolitik.

Wawancara dengan salah satu warga “Ibu Haryati”, Ibu Rumah Tanggal 03 Januari 2014 mengatakan:

“ saya tidak tertarik dengan pemilu karna saya tidak tahu untuk apa pemilu itu dan saya juga tidak tertarik dengan calon yang ada.

Wawancara dengan “Indra Wahyu”, seorang Mahasiswa tanggal 03 Januari 2014 :

“ saya ikut memilih karna saya tertarik dengan salah satu pasangan calon yang mana dulu pernah menjadi pemimpin di kota Pekanbaru ini dan menurut saya pasangan calon yang saya pilih akan membawa perubahan untuk Provinsi Riau”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Air Hitam. Sebab, masyarakat Kelurahan Air Hitam yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak ikut memilih (golput) dalam pemilihan karena mayoritas masyarakat berpendidikan SLTA/ sederajat. Jadi tingkat pendidikan rendah maupun tinggi sangat mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan.

1.1.3 Pengaruh Keluarga

Secara umum apabila kepala keluarga tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh kepada anggota keluarga lainnya untuk tidak memilih, begitu juga dengan kuatnya pengaruh kepala keluarga dalam menentukan pilihan politik keluarga.

Wawancara dengan “Ahmad” seorang Pengusaha bengkel mobil dan kepala keluarga tanggal 03 Januari 2014 mengatakan:

“ saya suka dengan pasangan calon nomor urut 1 Herman-Agus karna mereka menurut saya bisa membangun Riau ini, dan dulu pak Herman pernah menjadi Walikota Pekanbaru dan sudah terbukti kualitasnya, oleh karna itu saya menyuruh istri dan anak saya memilih pak Herman juga.

Wawancara dengan “Kamaluddin” seorang pengusaha tahu dan kepala keluarga, tanggal 03 Januari 2014 mengatakan :

“pada hari pemilihan saya dan anak-anak saya sibuk bekerja di pabrik pembuatan tahu jadi kami tidak sempat ketempat pencoblosan atau TPS”

Wawancara dengan “Aprizar” seorang Pedagang tanggal 03 Januari 2014 mengatakan:

“ saya dan anak saya sibuk mengurus dagangan dan tidak ada waktu untuk pergi ke TPS, tidak ada pengaruhnya bagi saya dan keluarga saya jika salah satu dari pasangan calon menang.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan kepala keluarga sangat mempengaruhi perilaku politik dari suatu keluarga.

1.2 Faktor Psikologis

Penjelasan *non-voting* dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang.

Wawancara dengan “Teguh Agus Satria” Pemilih pemula pada tanggal 04 januari 2014 mengatakan

“ saya malas ke tempat pencoblosan karna saya belum pernah ikut pemilu. Selain itu saya memang tidak berniat ikut pemilu”

Wawancara dengan “Leo” Pemilih Pemula pada tanggal 04 Januari 2014 mengatakan:

“saya belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya, selain itu saya kira tidak ada pengaruhnya jika saya ikut atau tidak ikut dalam pemilihan gubernur yang lalu.”

Wawancara dengan “Kokoh Agus” wiraswasta pada tanggal 04 januari 2014 mengatakan:

““ saya memang tidak ingin ikut dalam pemilu makanya saya tidak datang ke TPS karna saya malas saja dan saya kira masih banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat yang dapat saya lakukan”

Dalam konteks semacam ini, para pemilih pemula mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh, cenderung menarik diri dari pencatutan politik langsung, karena kurangnya pendidikan politik yang didapat sehingga mereka tidak mengetahui apa manfaat dari pemilihan umum secara langsung tersebut, serta tidak ada yang berhubungan dengan kepentingannya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomis, dan alenasi.

Wawancara dengan ketua KPU kota Pekanbaru, bapak T. Rafizal AR, S.Sos, M.Si pada tanggal 27 desember 2013, mengatakan bahwa:

“KPU kota Pekanbaru sudah melaksanakan peyelenggaraan pemilihan umum secara maksimal dan sukses, kalau ditanya mengapa partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru rendah, hal itu tidak dapat kami nilai, namun kami dapat mengasumsikan bahwa itu tergantung pada kepribadian atau sikap dari pemilih, kebanyakan masyarakat kita tidak dapat datang ke TPS karena bagi mereka banyak hal yang lebih penting dari pada memberikan hak suaranya, dan sikap apatis dari masyarakatlah yang meyebabkan partisipasi masyarakat pada pemilu yang lalu rendah.”

Wawancara dengan Lurah Air Hitam, Bapak Porwil,SH,M.Si yang diwawancarai pada tanggal 5 januari 2014, menilai bahwa:

“ Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat kelurahan Air Hitam ini rendah yakni,1. banyak masyarakat yang terdaftar di DPT namun tidak lagi berdomisili atau tinggal di Kelurahan Air Hitam, 2. Pemilihan umum yang melalau dua putaran, hal ini membuat masyarakat enggan untuk kembali memilih, 3. masyarakat yang kurang menyadari bahwa itu adalah hak mereka untuk memilih namun tidak mau mengunakan hak pilihnya mereka masa bodoh saja dan tidak mau tahu atau apatis.

Wawancara Ketua PPK Kecamatan Payung Sekaki. Ir. Sunarto M.Si pada tanggal 27Desember 2013 :

“Menurut saya mengapa partisipasi masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki khususnya Kelurahan Air Hitam ini pertama adalah, penduduk di Kelurahan Air Hitam ini kebanyakan warga pindahan, selain itu masyarakat tidak percaya lagi pada pemimpin dan yang paling utama karna kepribadian pemilih tersebut yang mana mereka memiliki sikap apatis, tidak mau tahu.

Wawancara dengan Ketua PPS Kelurahan Air Hitam, Ir. Husien MK pada tanggal 3 Januari 2014:

“ Sikap masyarakat yang Apatis meyebabkan banyaknya terjadi golput, kami sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarkat di Kelurahan Air Hitam ini, kami pun mengingatkan kembali pada saat mengantar surat undangan memilih untuk datang pada hari pemilihan dan jangan golput, namun respon masyarakat bermacam macam, ada yang dengan semangat dan ada juga yang acuh tak acuh. Malahan ada beberapa warga mengatakan dengan terang terang ia tidak akan datang ke TPS.

1.3 faktor pilihan Rasional

Sebenarnya teori pilihan rasional ini diadopsi oleh ilmuwan politik dari ilmuwan ekonomi. Karena dalam ilmu ekonomi menekankan modal sekecil kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini senada dengan perilaku politik yaitu seorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan untung ruginya sejauh visi dan misi yang diberikannya oleh pasangan calon tersebut akan menguntungkan dirinya, atau sebaliknya malah merugikan.

Wawancara dengan “H. Ishak” Tokoh masyarakat pada tanggal 03 Januari 2014 mengatakan:

“ saya memilih karna saya tertarik dengan visi dan misi yang di berikan oleh salah satu pasangan calon, saat itu ia datang dalam suatu acara dimesjid kami dan saat itu salah satu pasangan calon memberikan beberapa program yang menurut saya sangat bagus dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakya, selain itu calon tersebut sudah pernah memimpin kota Pekanbaru dan hasil kepemimpinannya sangat terasa manfaatnya.”

Wawancara dengan “Salim”, buruh bangunan tanggal 05 Januari 2014 mengatakan bahwa:

“ kami ini masyarakat kecil, kami perlu bukti bukan hanya sekedar janji janji yang keluar dari calon pemimpin tersebut. Pekerjaan saya lebih penting dari pada pergi ke nyoblos ke TPS, selain itu saya tidak tertarik pada calon calon yang ada.

1.4 Faktor Struktural

Faktor struktural menjadi pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada diakibatkan persoalan teknis. Dalam hal ini, pendataan dan pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pendistribusian kartu pemilih dan penentuan lokasi/tempat pemungutan suara yang kacau memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga mengugurkan hak mereka sebagai pemilih.

Wawancara dengan salah seorang anggota KPPS “Akbi Sutrowidoyo”, 24 Juni 2014 :

“menurut saya, jika ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT hal itu tidaklah sepenuhnya kesalahan petugas, seharusnya warga yang tidak terdaftar segera melapor kepetugas atau ke RT dan RW setempat karna dalam pemilihan umum ini semua kalangan harus terlibat.

I. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Putaran ke dua yang lalu tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki rendah hal ini turun dibandingkan putaran pertama. Pada putaran kedua masyarakat yang ikut memilih hanya 34,61 %. Hal ini menggambarkan bahwa minat masyarakat dalam berpartisipasi mengalami penurunan.
2. Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan memberikan pengaruh besar bagi partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Air Hitam. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula wawasan mengenai politik dan masyarakat yang berpendidikan tinggi pada umumnya menyadari akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan jenis pekerjaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat. Semakin beragam pekerjaan masyarakat akan membuat masyarakat tersebut sulit untuk meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, terlebih lagi bagi masyarakat kalangan menengah kebawah yang sehari-hari disibukkan dengan pekerjaan. Dan faktor pengaruh kepala keluarga juga membuat partisipasi dalam pemilu, apabila kepala keluarganya ikut memilih pada umumnya anggota keluarga lainnya akan mengikut, begitu juga sebaliknya apabila kepala keluarga tidak ikut memilih maka anggota keluarganya cenderung mengikuti.
3. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi. mayoritas masyarakat yang diwawancara lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS memberikan suara, karena faktor ekonomi dimana masyarakat lebih memilih bekerja dari pada hilang penghasilannya dari pada hadir di TPS yang berdampak pada berkurangnya penghasilan, sementara tuntutan ekonomi keluarga semakin kuat.
4. Sikap apatisme terhadap pemilihan gubernur. Hasil temuan penelitian mayoritas masyarakat yang tidak memilih menganggap bahwa dengan dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini tidak akan membawa perubahan apapun baik terhadap kehidupan mereka. Menurut mereka perhelatan semacam Pilgub ini hanyalah sebuah rutinitas politik saja tanpa menjanjikan suatu perubahan yang berarti.

2. Saran

1. sebaiknya pihak-pihak yang terkait dengan dengan proses demokratisasi di tingkat daerah seperti KPUD, PPK, PPS, LSM, Pemerintah Daerah, Tim Sukses dan *stakeholder* lainnya lebih giat untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan politik akan meningkat.
2. setiap calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah harus lebih kompeten dan juga menawarkan program-program yang konkret bukan hanya sekedar janji-jani karena masyarakat menginginkan bukti bukan hanya janji belaka, bial pasangan calon dapat menarik simpati dari masyarakat dengan visi misinya akan menjadi daya tarik tersendiri untuk merangsang partisipasi politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam.** 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bugin, Burhan.** 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Media.
- Evans, Joeclyn A.J.** (2004) Voters and Voting. London:SAGE Publication.
- Huntington, Samuel P, dan nelson, Joan.** 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta.
- Prihatmoko, Joko J.** 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan Di indonesia, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Rush, Michael dan Althof, Philip.** 2001. Pengantar sosiologi politik. Jakarta : CV. Rajawali.
- Sastroadmojo, Sudjono. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, 1995
- Subakti, Ramlan.** 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2005 *tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Skripsi, Jurnal

Hasanuddin M. Saleh, *Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Di Riau: Suatu Bahasan Awal*, Makalah pada seminar yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau, 2 September 2007 di Pekanbaru.

Monang Simarmata, *Analisis partisipasi politik masyarakat kota Pekanbaru pada Pemilukada tahun 2011 (studi kasus Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan)*, Skripsi ilmu Pemerintahan , fisip, universitas Riau.

Bismar Arianto. 2011, '*Analisis peyebab masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu*'. Jurnal ilmu politik dan ilmu pemerintahan, vol 11, No.1. 2011